



WFD

LAPORAN DELEGASI DPR RI



ASEAN WOMEN'S POLITICAL LEADERSHIP

Nusa Dua, Bali 7 - 8 Desember 2022

BKSAP DPR RI
2022



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

The Westminster Foundation for Democracy (WFD) merupakan organisasi yang berpusat di Inggris yang mendedikasikan untuk mendukung demokrasi di seluruh dunia. Untuk menciptakan sistem politik yang lebih adil dan inklusif, akuntabel, dan transparan, WFD menjalin mitra dengan partai politik, parlemen, dan organisasi masyarakat sipil. WFD membantu memperkuat kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, serta memastikan Lembaga tersebut memiliki sistem, pengetahuan, dan keterampilan untuk bekerja secara efektif. WFD juga mendorong proses demokrasi yang lebih baik, menyatukan individu dan institusi, serta mendorong untuk bekerja sama memecahkan masalah-masalah konkret, menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi.

Fokus WFD terkait kepemimpinan politik perempuan mempertimbangkan faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang menghentikan perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam politik dan pemerintahan. WFD bekerja sama dengan mitranya untuk mengembangkan sistem dan strategi dengan mengedepankan program untuk membantu menanamkan analisis gender di semua aspek bisnis parlementer, mendukung kepemimpinan politik perempuan, serta mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dalam politik.

Perempuan di kancah politik di negara-negara ASEAN tidak memiliki kedudukan de facto yang setara dengan laki-laki. Ketidakseimbangan struktural ini membuat pemerintah merumuskan dan menerapkan kebijakan yang tidak tanggap atau merugikan kebutuhan perempuan dan anak. Hambatan yang dihadapi perempuan untuk berpartisipasi dan menjadi pemimpin dalam politik bersifat sistemik dan kompleks. Dampak dari hambatan tersebut dapat dilihat dari rendahnya keterwakilan perempuan di semua tingkatan politik serta struktur dan praktik partai politik di ASEAN. Kecenderungan pemimpin perempuan selama ini berasal dari latar belakang elit atau mereka yang diposisikan untuk mempertahankan statusquo dari pada menciptakan jenis gangguan positif yang mengarah pada tingkat inklusi, akuntabilitas, atau transparansi yang lebih tinggi.

Program WFD bagi kepemimpinan politik perempuan terutama di Indonesia, Malaysia dan Thailand, mendapatkan dukungan dana dari Global Affairs Canada. Tujuan dari program yang diselenggarakan selama 18 bulan ini adalah untuk memajukan kesetaraan dalam politik dan masyarakat yang lebih luas melalui penciptaan lingkungan yang memungkinkan perempuan untuk aktif

secara politik dan berpartisipasi menjalankan kepemimpinan dalam politik di tingkat nasional dan lokal khususnya di tiga negara tersebut dan umumnya di negara-negara ASEAN.



DPR RI berpartisipasi pada ASEAN Women's Political Leadership yang diselenggarakan oleh Westminster Foundation for Democracy (WFD) di Nusa Dua Bali, 7-8 Desember 2022. Foto: BKSAP

B. Dasar Pengiriman Delegasi

Partisipasi Delegasi BKSAP DPR RI menghadiri ASEAN Women's Political Leadership di Nusa Dua, Bali pada tanggal 7 – 8 Desember 2022 berdasarkan Surat Tugas NOMOR : 657KU.02.02/ST/12/2022, tanggal 1 Desember 2022.

C. Susunan Delegasi

NO.	N A M A	NO. ANGGOTA	JABATAN	FRAKSI
1.	DR. FADLI ZON	A-86	Ketua BKSAP	F-Gerindra
2.	GILANG DHIELAFARAREZ	A-179	Wakil Ketua BKSAP	F-PDI Perjuangan
3.	PUTU SUPADMA RUDANA	A-563	Wakil Ketua BKSAP	F-Demokrat
4.	Dr. MARDANI ALI SERA	A-422	Wakil Ketua BKSAP	F-PKS
5.	A. HAFISZ TOHIR	A-487	Wakil Ketua BKSAP	F-PAN
6.	IRINE YUSIANA ROBA PUTRI	A-262	Anggota BKSAP	F-PDI Perjuangan
7.	AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI	A-185	Anggota BKSAP	F-PDI Perjuangan

8.	VANDA SARUNDAJANG	A-254	Anggota BKSAP	F-PDI Perjuangan
9.	PUTERI ANETTA KOMARUDIN	A-295	Anggota BKSAP	F-Golkar
10.	ADDE ROSI KHOERUNNISA	A-324	Anggota BKSAP	F-Golkar
11.	KATHERINE ANGGELA OENDOEN	A-123	Anggota BKSAP	F-Gerindra
12.	R. WULANSARI (Mulan)	A-96	Anggota BKSAP	F-Gerindra
13.	ARZETI BILBINA	A-32	Anggota BKSAP	F-PKB
14.	LINDA MEGAWATI	A-545	Anggota BKSAP	F-Demokrat
15.	SAKINAH ALJUFRY	A-456	Anggota BKSAP	F-PKS
16.	EMA UMIYYATUL CHUSNAH	A-471	Anggota BKSAP	F-PPP

D. Visi dan Misi Delegasi

Adapun misi delegasi BKSAP DPR RI menghadiri agenda tersebut adalah:

1. Meningkatkan sinergi antara parlemen, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya
2. Berkontribusi aktif pada dialog-dialog yang dilaksanakan WFD dalam bidang peningkatan peran dan kontribusi perempuan di dunia politik.
3. Memperkuat peran parlemen dalam mendorong aksi nyata dalam menghapuskan stigma gender di dunia politik, utamanya di negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN).

E. Persiapan Pelaksanaan Tugas

Sebagai persiapan menghadiri ASEAN Women's Political Leadership, Tenaga Ahli dan Sekretariat Biro KSAP mengolah materi bahan rujukan dari berbagai masukan yang komprehensif.





II. Isi Laporan

A. Susunan Acara

NO.	HARI/TGL/JAM	ACARA	TEMPAT
Rabu, 7 Desember 2022			
1.	12.30 - 13.00 WITA	Onsite registration	
2.	13.00 – 13.15 WITA	<p>Welcoming and Opening of the Meeting</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matthew Hedges Regional Director for Asia and the Americas, Westminster Foundation for Democracy (WFD) • Fadli Zon MP Chair of the Inter-Parliamentary Cooperation Committee (BKSAP) DPR RI <p><u>Keynote Speech</u> Leny Nurhayanti Rosalin: Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA</p>	
3.	13.15 – 14.15 WITA	<p>Session 1 - Launch of ASEAN Women’s Political Leadership Research</p> <p>Setting the context of the discussion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chair: Cecillia Makonyola Head of Practice (Inclusion), Westminster Foundation for Democracy (WFD) • Aim Sinpeng Lead researcher, University of Sydney, Australia • Amalinda Savirani Lead researcher, Universitas Gadjah Mada, Indonesia <p>Discussants:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ryce Chanchai UN Women (TBC) • Pannika Wanich Progressive Movement, Thailand 	



		<ul style="list-style-type: none"> • Emu Umiyyatul Chusnah Member of Comission IV on Agriculture, Plantations, Maritime, Fisheries and Food, and Environment; 	
4.	14.15 – 14.30 WITA	Photo session and networking	
5.	14.30 – 15.20 WITA	<p>Session 2 – Pathways to Women’s Political Leadership in ASEAN</p> <p>Introduction to profiles and pathways of women’s leadership in ASEAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Phetmany Xaychaleune Laos Country Director, Westminster Foundation for Democracy (WFD) <p>Discussants:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luluk Nur Hamidah MP, Secretary General of Indonesian Women Parliamentarian Caucus, Indonesian House of Representatives • Lim Yi Wei Malaysia State Assembly person (KIV) 	
6.	15.20 – 15.25 WITA	Break	
7.	15.25 – 16.55 WITA	<p>Roundtable discussion on Gender Responsive Budgeting</p> <ul style="list-style-type: none"> • Janet Veitch Expert on GRB, Westminster Foundation for Democracy(WFD) • Omna Sreeni-Ong Founder and Managing Director of ENGENDER Consultancy, Malaysia • Fuziah Salleh former Malaysian MP & currently defending her seat • Puteri Anetta Komarudin Member of Comission XI on Finance and Member of the Committee for Inter Parliamentary Cooperation of the Indonesian House of Representatives • UK MP 	



		Focus Group Discussion Interactive Discussion • Facilitator: Usha Sabanayagam Malaysia Country Director, Westminster Foundation for Democracy (WFD)	
8.	16.55 – 17.00 WITA	Closing by Chair Cecillia Makonyola Head of Practice (Inclusion), Westminster Foundation for Democracy (WFD)	
Kamis, 8 Desember 2022			
9.	09.30-09.40	Opening by Chair Felicity Herrman Senior Programme Manager, Westminster Foundation for Democracy (WFD)	
10.	09.40-09.50	Remarks Vicky Singmin Chargé d'affaires at the Mission of Canada to ASEAN	
11.	09.50-10.00	Setting the Context Facilitator: Phetmany Xaychaleune Laos Country Director, Westminster Foundation for Democracy (WFD)	
12.	10.00-10.10	Reflection from the ASEAN WPL report's launch by the country champions	
13.	10.10-11.00	Coalition for Change strategy planning and priorities for regional campaign	
14.	11.00-11.15	Break	
15.	11.15-12.00	Coalition for Change strategy planning and priorities for regional campaign	
16.	12.00-13.00	Check out and Lunch	

B. Jalannya Acara

ASEAN Women's Political Leadership, melalui agenda ini, WFD ingin menyajikan hasil penelitian tentang hambatan-hambatan yang menghalangi perempuan untuk berkontribusi sebagai pemimpin politik di Kawasan ASEAN. Pada opening session (sesi pembukaan), Matthew Hedges yang merupakan Regional Director for Asia and the Americas, Westminster Foundation for Democracy (WFD) menyampaikan sambutannya. Kemudian Ketua BKSAP DPR RI Dr. Fadli Zon turut menyampaikan sambutannya. Dan dilanjutkan dengan *keynote speech* dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Leny Nurhayanti Rosalin.

1. Welcoming and Opening of the Meeting

a. Matthew Hedges: Regional Director for Asia and the Americas, Westminster Foundation for Democracy (WFD)

Mengawali sambutannya, Matthew Hedges mengapresiasi kontribusi DPR RI sebagai mitra yang baik bagi WFD dalam melakukan berbagai kegiatan.



Masalah kesetaraan gender untuk demokrasi terutama kepemimpinan perempuan, masih difokuskan pada beberapa program khusus. Pada agenda ini WFD ingin memperluas dan meningkatkan kontribusi perempuan terutama di bidang politik.

Forum *women parliament* ini akan mencoba mengurai hal-hal apa saja yang menghalangi perempuan untuk tampil lebih giat dan aktif di dunia politik. Ia menyampaikan, WFD juga telah melakukan penelitian terhadap 50 perempuan di Indonesia, Malaysia dan Thailand yang turut berpengaruh dalam pembuatan kebijakan.

Ia juga menyampaikan bahwasanya akan ada bahasan terkait pengalokasian anggaran berbasis gender serta apa saja yang harus dilakukan untuk mendukung penganggaran tersebut. Kepada peserta forum, **Mathew Hedges** menekankan betapa pentingnya peran parlemen untuk meningkatkan partisipasi aktif perempuan di dunia politik.

b. Dr. Fadli Zon: Chair of the Inter-Parliamentary Cooperation Committee (BKSAP), DPR RI

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dr. Fadli Zon menyampaikan, perlu penelitian dan kajian lebih lanjut untuk membuktikan kebenaran adanya fenomena kemunduran demokrasi yang berbarengan dengan menguatnya gerakan yang menentang hak-hak perempuan.

Demokrasi memiliki hubungan positif untuk menjamin kebebasan, kesetaraan, keadilan, partisipasi inklusif, dan transparansi. Dengan kata lain, demokrasi memberikan ruang yang lebih kondusif bagi politisi perempuan untuk eksis di dunia politik.

Fadli menyoroti poin ke-empat yang disampaikan WFD yang menetapkan tiga hambatan utama yang ditentang oleh perempuan untuk mencapai kepemimpinan politik. Yakni kurangnya sumber daya keuangan, seksisme, dan represi negara. Ada yang menganggap itu adalah hambatan bagi perempuan menuju kepemimpinan politik di kawasan ASEAN.

Pemimpin politik perempuan yang melaporkan tidak ada hambatan untuk kepemimpinan berasal dari keluarga politik, memiliki hubungan yang kuat dengan partai politik, atau perintis politik.



Ketua BKSAP DPR RI Dr. Fadli Zon menyampaikan pandangannya saat acara ASEAN Women's Political Leadership. Foto: BKSAP

Fadli sepakat dengan temuan tersebut yang menampilkan sisi lain kehidupan masyarakat luas. Hal tersebut merupakan realita yang sudah tertanam dan mengakar kuat di masyarakat. Diperlukan upaya ekstra untuk dan bertahap untuk meluruskan cara pandang keliru itu.

Secara struktural, parlemen diminta untuk memastikan bahwa semua instrumen hukum nasional mendukung perempuan menuju kepemimpinan politik. Dapat dipahami, beberapa politisi perempuan sangat menentang inisiatif tindakan afirmatif, karena mereka memandangnya sebagai antagonis terhadap pemberdayaan perempuan. Bukan karena tidak berguna, tapi perlu lebih diperkuat.

Secara kultural, terang Fadli, perlu ditanamkan sejak dini pendidikan berdasarkan prinsip inklusivitas, kesetaraan, dan keadilan. Nilai-nilai luhur tersebut harus mengakar dan tertanam dalam kehidupan masyarakat. masyarakat sehingga tercipta generasi muda yang memiliki pemikiran terbuka dan memandang manusia tanpa melihat jenis kelamin.

Mungkin memang membutuhkan waktu yang lama. Namun, dampaknya yang sangat positif untuk mereformasi status quo pada budaya masyarakat. Di sisi lain, kita juga harus terus meningkatkan kesadaran di kalangan elite politik dan sosial akan pentingnya peningkatan kapasitas perempuan agar lebih tangguh dan mandiri secara ekonomi.

c. Leny Nurhayanti Rosalin: Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)



Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA Leny Nurhayanti Rosalin menyampaikan pandangannya secara virtual. **Foto: BKSAP**

Leny menyampaikan komitmen Kementerian PPPA untuk memperjuangkan kesetaraan gender di berbagai bidang termasuk juga di bidang politik. Pertemuan seperti ini sejatinya dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan gender dan pembangunan perempuan di negara-negara ASEAN.

Dengan melihat tren dan peluang yang ada, dimana mempengaruhi segala sistem yang ada, para pemimpin negara-negara dunia melihat transformasi digital yang sangat cepat. Untuk itu dibutuhkan ruang kerja yang ramah bagi kaum perempuan.

Leny sangat memperhatikan pengambilan keputusan baik itu di kalangan pemerintah, maupun di sektor swasta. Kementerian PPPA mendorong dikembangkannya kapasitas perempuan sehingga menunjang peningkatan indeks kesetaraan gender. Untuk itu, sinergi antara parlemen, pemerintah (Kementerian PPPA), parpol, pemda, akademisi, media anak muda dan lain-lain harus diperkuat.

2. Launch of ASEAN Women's Political Leadership Research (Session-1)

Agenda

- 1 What is this research about and research questions
- 2 Eight main findings



Aim Sinpeng

Co-principal Investigator
University of Sydney



Amalinda Savirani

Co-principal Investigator
Universitas Gadjah Mada



Saowanee Alexander

Thailand Research Node
Ubon Ratchathani University



Adriana Nordin Manan

Malaysia Research Node
Women's Aid Organization



Khoirunnisa Agustyati

Indonesia Research Node
Perludem



Heroik Mutaqin Pratama

Indonesia Research Node
Perludem



Para narasumber pada sesi 1 diskusi ASEAN Women's Political Leadership yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali. Foto: BKSAP

- Dr. Aim Sinpeng: Lead researcher, University of Sydney, Australia**
Dr. Aim Sinpeng mengutarakan bahwa kepemimpinan perempuan bukan hanya menghitung jumlah anggota perempuan di parlemen, namun juga kepemimpinan perempuan di komunitas atau organisasi sipil. Hal



terpenting dari agenda ini adalah mengetahui permasalahan terbesar apa yang dihadapi oleh perempuan di kawasan ASEAN yang ingin meningkatkan peran kepemimpinan perempuan.

Dalam penelitiannya, ia menemukan beberapa hal diantaranya para pemimpin perempuan biasanya adalah mereka yang memiliki jaringan dan berusaha memperluas jaringannya untuk memperkuat kepemimpinan mereka.

Di sisi lain ada perempuan lain yang menghadapi rintangan yang relatif lebih kecil dibanding perempuan yang lain untuk mencapai kepemimpinan tersebut. Namun, ada juga beberapa badan pemerintahan yang menjadi rintangan utama bagi perempuan yang berupaya menjadi pemimpin di dunia politik. Bisa juga terjadi kekerasan berbasis gender yang mencegah, menghalangi, atau memberikan kesulitan terhadap perempuan yang berupaya menggapai kepemimpinan politik.

Kemudian, di beberapa negara tidak semua partai politik memiliki peraturan atau kebijakan untuk menempatkan perempuan di parlemen baik itu tingkat nasional atau daerah. Selain itu, variabel sosial ekonomi, seperti agama, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan akan mendorong dan mendukung kepemimpinan perempuan.

Dalam beberapa situasi, ia melihat dukungan politis bagi perempuan sering kali menurun di lokasi-lokasi lebih religius khususnya di kawasan muslim. Penelitian ini juga melihat representasi perempuan di beberapa lokasi cukup jarang ditemukan. Ada beberapa agenda yang bisa didorong oleh para pemimpin di tingkat akar rumput tapi ini membutuhkan konsistensi dalam pelaksanaannya.

b. Saowanee Alexander: Thailand Research Node Ubon Ratchathani University

Saowanee Alexander menyampaikan, dimana ia telah mewawancarai 50 pemimpin perempuan di Thailand. Dari riset tersebut, ia berkesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi kepemimpinan perempuan adalah latar belakang keluarga, pengalaman hidup seperti diskriminasi yang sangat terstruktur. Kemudian latar belakang organisasi apakah dari kalangan progresif dan juga konservatif, serta beberapa atribut yang melekat di diri mereka yang hal tersebut bisa menjadi tantangan.

Pada kesempatan ini, ia juga menyampaikan sebuah riset yang dilakukan oleh **Adriana Nordin Manan** di Malaysia. Dimana, saat agenda ini digelar, Adriana sedang berhalangan hadir.



Malaysia adalah negara dengan jumlah pemimpin perempuan yang paling rendah. Ada banyak rintangan bagi perempuan untuk mencapai tingkat kepemimpinan. Salah satunya rintangan budaya, yaitu perilaku publik terhadap perempuan yang berada dalam politik menjadikan Malaysia kedua terendah di kawasan ASEAN dalam hal kepemimpinan perempuan.

Kemudian para pemimpin muda, aktivis, dan aktivis sosial media itu biasanya menghadapi tantangan yang paling besar. Lalu ada beberapa pengamatan, yaitu hambatan sosial ekonomi tampaknya dapat diatasi sebagaimana terbukti dalam kasus di Malaysia. Kemudian faktor struktural dan budaya lebih sulit diatasi dengan adanya kekerasan yang dilembagakan dan preferensi opini publik yang meluas untuk pemimpin politik laki-laki. Dan juga kesempatan untuk pemimpin perempuan akar rumput untuk mendapatkan kepemimpinan politik menjadi lebih luas namun ini tidak terjadi pada pemimpin perempuan ditingkat politik lokal dan juga nasional.



c. Khoirunnisa Nur Agustyati: Indonesian Research Node Perludem

Khoirunnisa Nur Agustyati menyampaikan bahwa dalam konteks di Indonesia, peneliti melakukan riset tak hanya terhadap politisi perempuan tetapi juga kepada aktivis perempuan. Berbicara tentang politik di Indonesia, dimana pemilu akan diselenggarakan di 2 tahun

mendatang, ia berharap riset ini bisa memberikan refleksi tentang apa saja yang bisa dilakukan pada Pemilu berikutnya.

Lalu, terkait dengan tantangan terhadap kepemimpinan politik Indonesia, ia berpandangan sistem proporsional yang diterapkan berarti ini lebih berfokus pada kandidat. Kandidat tidak hanya berkompetisi dengan kandidat dari partai politik lain tapi juga dapat berkompetisi dengan perempuan di dalam partai politiknya. Ini tidak mudah, meskipun ada undang-undang aksi afirmatif dimana setiap partai politik harus mengisi 30 persen untuk perempuan dan posisi perempuan juga telah ada regulasi.

Ia menyampaikan, biaya pemilu di Indonesia cukup mahal, karena setiap kandidat harus berupaya sekeras mungkin untuk mendapatkan suara. Tak hanya di lapangan tapi terkadang perempuan juga mengalami kekerasan lewat media sosial, misal lewat lelucon atau kalimat-kalimat *sexist*. Bahkan tak segan, warganet menyingkap masa lalu mereka yang biasa disampaikan saat mendekati pemilu.

Kemudian, tantangan yang tak mudah juga diterima oleh perempuan pembela HAM. Terkadang mereka dikriminalisasi terutama saat mereka mengangkat isu-isu sensitif, seperti isu ketenagakerjaan, isu pekerja migran atau perempuan yang mengadvokasi isu lingkungan hidup.

d. Ryce Chanchai: ASEAN Governance Peace and Security Lead dari UN Women di Kantor Indonesia

Ryce Chanchai mengatakan pandemi Covid-19 telah memicu krisis di seluruh dunia, tak terkecuali di Asia Tenggara. Pandemi memaksa kita untuk melihat lebih dalam pada isu-isu pembangunan berkelanjutan, prinsip untuk tidak meninggalkan siapapun di belakang. Penting untuk melihat pada dinamika gender dan konteks partisipasi politik maupun dalam kepemimpinan saat masa pemulihan setelah pandemi.

Ia juga mengamati adanya tren yang cukup mengkhawatirkan terutama terkait dengan kebebasan berekspresi setelah Covid menyebar, yaitu dengan meningkatnya polarisasi dan ketidaksetaraan. Bisa dilihat ada keperluan politik seperti respon pemulihan, kemungkinan monopolisasi kuasa dan juga keinginan untuk mencapai kepemimpinan. Ada juga yang dapat menciptakan konflik dan mendestabilisasi, seperti ras, agama, dan ideologi.





Ia menambahkan, jika riset ini ingin lebih dikembangkan lagi perlu dianalisa isu kesetaraan gender, kepemimpinan perempuan dan partisipasi politik perempuan. Terutama dalam polarisasi seperti meningkatnya konservatisme, dan juga otoriterisme.

Ada beberapa pembelajaran yang bisa diambil dari pemilu yang dilaksanakan di Malaysia baru-baru ini. Ada perubahan lanskap pemilu dan juga para pemilih muda. Terlihat bahwa afiliasi telah menghasilkan *outcome* yang menarik tidak hanya terkait dengan gender tapi juga ada kesempatan untuk lebih terlibat.

Tanggapan dari forum diskusi

a. Ema Umiyyatul Chusnah: Anggota BKSAP DPR RI

Sebagai penanggung pertama, Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Ema Umiyyatul Chusnah menegaskan akan pentingnya bagi anggota parlemen perempuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kepemimpinan perempuan dan literasi digital. Oleh karena, kesadaran hal tersebut pada akhirnya akan menjadi sumber elektoral pencalonan perempuan di ranah politik.

Ia menyarankan untuk menguatkan peran literasi digital. Untuk itu perlu memajukan infrastruktur digital yang adil dan literasi digital bagi perempuan untuk mengurangi kesenjangan digital.

Politisi Fraksi PPP itu menilai literasi digital merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kesadaran publik terkait kepemimpinan perempuan di dunia politik. Ia juga berpandangan kepemimpinan perempuan dalam politik bisa menjadi game changer bagi kinerja demokrasi.

Demokrasi akan semakin berkembang jika kesempatan untuk mengambil estafet kepemimpinan tersebar luas, tak terkecuali bagi perempuan. Selain itu, ia juga sependapat bahwa hambatan struktural terhadap perempuan dalam hal keuangan, kesetaraan gender, dan sebagainya harus menjadi prioritas untuk diselesaikan.



Ia juga menekankan bahwasanya kesetaraan pendidikan bagi perempuan juga tak kalah pentingnya. Butuh dukungan yang kuat dari berbagai stakeholder untuk memulai itu semua. Karena dengan adanya pendidikan politik, masyarakat bisa memahami kebutuhan perempuan untuk berkembang. Kepemimpinan politik perempuan membutuhkan legitimasi publik dalam bentuk dukungan elektoral,” pungkasnya.

b. Atty. Sha Elijah Dumama-Alba: WFD Bangsamoro

Terkat partisipasi perempuan di Filipina, penanggap kedua ini merasa partisipasi perempuan di negaranya sudah berada di arah yang tepat. Ia berharap, transisi pemerintahan yang sedang berlangsung di negaranya tetap memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi agar lebih tercipta peluang untuk berkembang. Ia menyampaikan,

pemerintah Filipina sedang merancang untuk meloloskan Draft Undang-Undang Electoral dan UU yang bisa memperluas kesempatan bagi perempuan, baik itu di tingkat lokal maupun daerah.



c. Penanggap ketiga dari FCDO

Penanggap ketiga menyambut hangat atas terselenggaranya agenda ini. Ia mengucapkan selamat kepada seluruh anggota parlemen perempuan yang hadir di ruangan ini, juga aktivis-aktivis perempuan. Moment ini menjadi pengingat bagi pemimpin-pemimpin perempuan akan kesulitan-kesulitan yang telah dihadapi. Sebagai panutan, para pemimpin dan anggota parlemen serta aktivis perempuan harus melihat secara luas bagaimana sosok kepemimpinan perempuan yang diharapkan masyarakat luas.

Terkait partisipasi perempuan di bidang politik, ia menyampaikan ada hambatan-hambatan yang terjadi, utamanya yang melibatkan kekerasan terhadap perempuan. Ia tela meneliti, dari 45 orang perempuan, 88 persen diantaranya pernah mengalami pelecehan dikarenakan faktor kepemimpinan mereka. Hal tersebut tentu tidak bisa diterima. Hal yang sama juga terjadi pada kaum perempuan di akar rumput, beberapa diantaranya mengalami kekerasan yang harus segera diatasi.

Haruslah dipahami bersama, bahwasanya kekerasan berbasis gender harus segera diatasi. Ia berharap, para peserta yang hadir dalam diskusi

ini mengambil peranan secara global dalam mengatasi kekerasan gender. Ia juga perempuan dapat memainkan peranan kunci dalam siklus politik.

3. Pathways to Women's Political Leadership in ASEAN (Session-2)



Para narasumber pada sesi 2 diskusi ASEAN WPL yang mengangkat tema "Pathways to Women's Political Leadership in ASEAN". Foto: BKSAP

a. Phetmany Xaychaleune: Laos Country Director, Westminster Foundation for Democracy (WFD)

PAT dari Asean Woman Thailand memaparkan Tiga Tipologi yang merefleksikan perjalanan para pemimpin wanita di Asean yaitu : jejaring, aktivis, dan perintis. Jalur jejaring adalah jalur di mana jaringan pribadi dan profesional merupakan aset utama kepemimpinan politik. Ikatan jaringan dengan institusi, keluarga atau kelompok, adalah kekuatan pendorong utama yang membuka jalan bagi kepemimpinan. Seorang penggiat jejaring terutama mengandalkan jaringannya untuk menerobos penghalang menuju kepemimpinan politik. Penggiat jejaring cenderung memiliki modal finansial yang tinggi, terutama jika mereka diambil dari jaringan bisnis, yang dapat membantu mengatasi biaya finansial dalam politik.

Kemudian Jalur perintis atau akar rumput adalah salah satu yang ditandai dengan kewirausahaan politik. Jalur ini berlaku untuk perempuan yang memetakan perjalanan mereka sendiri menuju kepemimpinan dengan mendirikan partai, organisasi, atau kelompok politik baru untuk mengadvokasi perubahan politik. Wanita yang

mengadopsi jalur perintis memiliki latar belakang dan posisi yang beragam. Berlawanan dengan kepercayaan populer, mendirikan organisasi baru tidak memerlukan sumber daya keuangan atau jaringan politik yang signifikan untuk berhasil. Hal ini terutama berlaku untuk inisiatif akar rumput di mana organisasi tidak harus dibentuk secara formal untuk memulai kerja advokasi

Sedangkan Jalur aktivis dicontohkan oleh upaya berkelanjutan untuk mengadvokasi perubahan politik. Aktivis perempuan menghadapi hambatan terbesar untuk menjadi pemimpin politik jika mereka memilih untuk bergabung dengan organisasi yang ada. Karena mereka sering kekurangan modal politik, bisnis, dan sosial untuk mengejar kepemimpinan politik, mereka harus bekerja sampai ke puncak (kecuali organisasi sebagai kebijakan kuota gender). Ini adalah jalan yang diambil banyak pemimpin perempuan akar rumput karena latar belakang mereka sebagai aktivis di tahun-tahun awal mereka, seperti menjadi aktivis mahasiswa di universitas.

b. Lim Yi Wei: Malaysia State Assembly person (KIV)

Dalam paparannya, Yi mengatakan Jalan menuju kepemimpinan politik memiliki panjang yang berbeda-beda, dari pendek ke menengah hingga Panjang, mencerminkan jumlah dan jenis hambatan yang dihadapi setiap perempuan dalam mengejar kepemimpinan politik. Perempuan yang memiliki visi yang sama untuk perubahan sosial dan politik, yang mungkin berasal dari latar belakang yang berbeda.



Malaysia State Assembly person (KIV) Lim Yi Wei saat menjadi narasumber pada sesi 2 diskusi ASEAN WPL yang mengangkat tema "Pathways to Women's Political Leadership in ASEAN". Foto: BKSAP

Banyak kepemimpinan perempuan melalui jalur yang sangat panjang sehingga mereka lebih melakukan pendekatan dengan para pemilih perempuan. Riset menunjukkan bahwa partai politik merupakan pihak dari garis terdepan bisa mendukung atau menghalangi keterlibatan perempuan dalam politik. Keterlibatan perempuan tidak terlalu besar namun dapat ditingkatkan pencapaian perempuan didalam kepemimpinan politik.

c. **Luluk Nur Hamidah: Kaukus Perempuan Parlemen RI**

Dalam diskusi ini, Luluk mengatakan sebgai perempuan melalui jalur yang panjang menuju kepemimpinannya. Dan itu pula yang telah membantu kami dalam membangun kredibilitas sebagai politisi. Ada pertanyaan, seberapa banyak uang yang dimiliki untuk mengikuti kontestasi pemilu. Hal tersebut tentu membingungkan karena kita diajarkan bahwa politik adalah sesuatu yang berkaitan dengan uang. Karena kita berada di posisi yang sama untuk memenangkan pemilihan politik.

Pertemuan ini sangat penting untuk memperkuat jaringan kita semua dan sebagai sekretaris kaukus perempuan parlemen, Luluk merekomendasikan agar membangun kaukus wanita Asia yang mempunyai banyak waktu saling berbagi praktik-praktik baik pada negara kita sendiri maupun pada negara-negara di Anggota Wanita Asia ini.



d. **Pannika Wanich: Anggota Parlemen Thailand**

Dalam Pemaparan Pannika mengatakan, keberhasilannya mendapatkan posisi saat ini tak lepas dari pengalamannya. Ada dua faktor utama keberhasilannya pertama factor partai politik dan faktor budaya yg ada diparlemen.

Terkait dengan partai politik beliau termasuk salah satu pemimpin partai politik nomor 3 terbesar di thailand. Partainya pun memiliki anggota perempuan yang paling banyak. Ia mengatakan, perempuan parlemen Thailand sangat kagum sekali dengan perempuan parlemen dari indonesia yang dikenal sangat aktif. Mereka ingin sekali belajar dari Indonesia dan philipina. Ia juga mengatakan, keaktifan para perempuan di Indonesia dan Malaysia tak lepas dari dukungan dari pemerintahannya.



Anggota Parlemen Thailand Pannika Wanich berbagi pengalaman pada forum diskusi ASEAN WPL sesi 2. Foto: BKSAP

Discussant / Intervensi

a. **Penanggap pertama di sesi II**

Peran pemimpin perempuan di dunia politik sekarang ini merupakan topik yang hangat untuk diperbincangkan. Setelah melihat bagaimana keadaan-keadaan perempuan yang terjun di dalam dunia perpolitikan, teretus satu pertanyaan dalam acara ASEAN Women Political Leadership yang diselenggarakan pada tanggal 7 Desember 2022, di Nusa dua Bali. terkait apakah pemimpin politik perempuan dapat memiliki lebih dari satu profil.



Salah satu penanggap dalam diskusi sesi 2 pada forum diskusi ASEAN WPL sesi 2 dengan tema "Pathways to Women's Political Leadership in ASEAN". Foto: BKSAP

Pertanyaan seputar apakah pemimpin politik perempuan dapat memiliki lebih dari satu profil, yang mana jika dijelaskan secara lebih detail merujuk kepada sebuah perumpamaan terkait seorang aktivis yang merangkap menjadi seorang *networker* dapat bergabung ke dalam suatu posisi politik. Yang jika kita simpulkan, maka sangat terlihat jika individu ini memiliki tiga profil berbeda, yakni aktivis, *networker* dan politisi. Karena kita sedang membahas posisi politisi perempuan dengan profil lebih dari satu, maka dengan jelas pertanyaan ini ditujukan sebagai pengetahuan terkait politisi perempuan yang membawa profil berbeda-beda dalam penerapannya.

b. Tanggapan atas pertanyaan dari penanggap pertama

Perempuan di dunia politik harus melewati cukup banyak perjalanan yang panjang. Namun, kehadiran perempuan di dunia politik ini, memberikan kesan dan warna yang cukup menyegarkan, terlebih pada struktur yang sudah ada.

Ia mencontohkan bagaimana perjalanan karir politik seorang politisi perempuan asal Thailand yang memiliki latar belakang beragam. Sekilas tentang beliau, ia merupakan seorang politisi yang merangkap sebagai seorang aktivis asal Negeri Gajah Putih. Dengan diberikannya bukti nyata terkait figur yang ada, maka pertanyaan terkait apakah bisa seorang politisi perempuan merangkap 3 profil secara beriringan, maka jawabannya adalah bisa dan tidak akan mengganggu apapun.

c. Tanti: Kaukus Perempuan Politik Indonesia

Ia memaparkan ketentuan seorang perempuan agar dapat dikatakan sebagai seorang politisi. Secara umum politisi identik dengan partai politik. Sehingga anggapan bahwasanya menjadi politisi harus mempunyai latar belakang partai sangatlah kuat. Selain adanya partai, latar belakang parlemen pun juga melekat dengan politisi. Oleh sebab itulah, anggapan umum terkait politisi sangatlah identik dengan partai dan posisi anggota parlemen.

Pertanyaan pun datang dari anggapan tersebut, apakah benar jika seorang perempuan ingin menjabat di dalam dunia politik harus mempunyai latar belakang tertentu terlebih dahulu. Selain itu pun disinggung pula terkait bagaimana arti dari tujuan bersama yang dalam hal ini mengarah kepada kesetaraan dan juga keadilan. Dua makna yang berbeda namun saling berkaitan.

Menyinggung mengenai bagaimana patriarki ada di sektor politik, membuat kesadaran akan pentingnya memperbaiki sistem yang sudah ada agar tercipta sistem yang baru. Selain itu, dunia perpolitikan dapat dikatakan sebagai suatu kontes. Ketika perempuan hadir dan mencoba memasuki kontes tersebut dengan konsep patriarki yang melekat, maka kesempatan yang ada pun terbilang sempit. Oleh karena itulah tercipta feminisme. Feminis di sini mempunyai tugas yang cukup melelahkan karena harus melawan sistem yang sudah ada demi menciptakan ruang aman untuk perempuan.

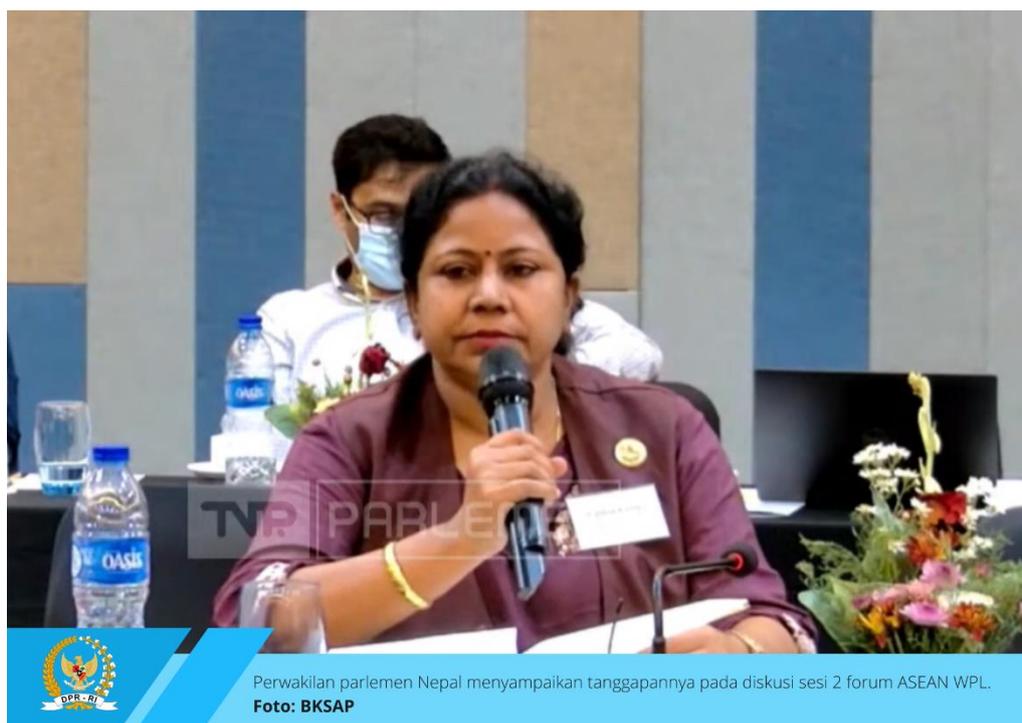


Perwakilan Kaukus Perempuan Politik Indonesia Tanti menyampaikan tanggapannya pada diskusi sesi 2 forum ASEAN WPL. Foto: BKSAP

d. Member of Parliament Nepal

Anggota parlemen Nepal membahas tentang bagaimana hanya terdapat 43 persen terkait sistem pemilu untuk beberapa laki-laki dengan mengikuti pemilihan umum secara langsung. Sedangkan 43 persen lagi dikhususkan bagi perempuan untuk pemilihan umum secara langsung, meskipun harus tetap mengutamakan *representative substansial* terlebih dahulu.

Dalam hal ini juga, perwakilan Nepal menyatakan jika negara mereka sendiri turut mengikutsertakan para perempuan dalam hal kasus-kasus perempuan, seperti kekerasan dan juga pernikahan dini yang marak terjadi. Oleh karena ini, perwakilan Nepal membagikan pengalamannya terkait bagaimana parlemen Nepal memberdayakan perempuan. Pemberdayaan perempuan ini dilakukan sebagaimana para perempuan yang ingin duduk di kursi parlemen agar mereka dibekali oleh pengetahuan dan *skill* yang mumpuni. Oleh karena itu hak perempuan perlu dikembangkan, baik secara hukum maupun sosial selama kurun waktu 15 tahun terakhir.



Perwakilan parlemen Nepal menyampaikan tanggapannya pada diskusi sesi 2 forum ASEAN WPL.
Foto: BKSAP

Menjadi politisi perempuan juga harus dibekali dengan kesadaran terkait bagaimana mereka paham akan haknya sebagai perempuan. Hal inilah yang harus dilengkapi dengan diadakannya pelatihan yang mencukupi. Pelatihan bagaimana tentang undang-undang dan juga regulasi konstitusi, *public speaking* serta pelatihan pengembangan skill untuk bisa diterapkan ketika sudah duduk di parlemen pemerintah.

4. Roundtable discussion on Gender Responsive Budgeting (Sessi 3)

a. Janet Veitch: Expert on GRB, Westminster Foundation for Democracy (WFD)

Dalam pidatonya baru-baru ini, Ia menggarisbawahi pentingnya penganggaran berbasis gender dalam menegakkan akuntabilitas dan demokrasi. Tanpa alokasi anggaran, kewajiban tidak dapat dipenuhi, untuk itulah penganggaran berbasis gender menjadi instrumen penting untuk mengelola keuangan negara dengan baik.



Wacana tersebut menekankan keharusan bagi pemerintah untuk menciptakan stabilitas ekonomi makro, menjaga kesejahteraan warga negara, dan menambah fokus mereka pada penganggaran berbasis gender. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengeluaran pemerintah ditekankan, menekankan perlunya memastikan bahwa pengeluaran efektif dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Tantangan berat yang dihadapi perempuan dalam ekonomi, meliputi pengetahuan yang tidak memadai, peluang yang tidak memadai, dan kesenjangan yang ada. Kebutuhan untuk melibatkan lebih banyak perempuan dalam angkatan kerja dan menciptakan lapangan kerja di mana perempuan dapat berkontribusi pada ekonomi ditekankan, sekaligus menyoroti potensi UMKM dalam memberikan peluang bagi perempuan.

Pidato tersebut menyatakan bahwa langkah-langkah mendasar, seperti pengumpulan data, penelusuran anggaran, dan penyediaan sumber daya bagi perempuan, dapat diadopsi untuk menjembatani kesenjangan kualitas dan memastikan peluang yang sama bagi perempuan dalam perekonomian. Pemantauan dan evaluasi juga ditekankan sebagai hal yang sangat diperlukan untuk meningkatkan upaya dan mencapai hasil yang diinginkan.

b. Omna Sreeni-Ong: Founder and Managing Director of ENGENDER Consultancy, Malaysia

Dalam pidato yang disampaikan di Malaysia, pembicara menekankan pentingnya Penganggaran Responsif Gender (GRB) sebagai strategi yang mengarusutamakan isu gender dalam perencanaan anggaran. Pembicara mengakui bahwa GRB bukan hanya advokasi pemerintah tetapi juga upaya masyarakat sipil untuk memastikan bahwa isu gender diberikan fokus dan dampak yang adil untuk semua. Pembicara menekankan bahwa GRB tidak boleh mengecualikan laki-laki dan strategi yang terdokumentasi dengan baik sangat diperlukan untuk menciptakan ketahanan, mengingat kebutuhan prioritas laki-laki, perempuan, dan anak-anak.



Founder and Managing Director of ENGENDER Consultancy, Malaysia Omna Sreeni-Ong berbagi pengalaman tentang GRB di negaranya. Foto: BKSAP

Pembicara juga menyoroti dampak pandemi terhadap ketidaksetaraan perempuan, baik secara sosial maupun ekonomi, dan menggarisbawahi bahwa banyak negara memerlukan kebijakan responsif gender dan penganggaran berbasis gender untuk memastikan pemulihan jangka

panjang yang berkelanjutan. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang tepat untuk membantu seluruh masyarakat, dan sumber daya yang memadai harus disediakan untuk mengatasi potensi dampak.

Pembicara menekankan pentingnya melibatkan masyarakat sipil dalam proses dan mendukung inisiatif untuk memastikan bahwa anggaran dilaksanakan dengan benar dan tidak ada yang tertinggal. Pembicara merujuk pada perangkat praktis yang dibuat untuk implementasi GRB, termasuk pemanfaatan data blender terpisah untuk menggambarkan situasi di lapangan, dan pentingnya melakukan analisis gender untuk memperoleh data dari sumber akar rumput dan menggunakannya untuk membuat kebijakan.

Terakhir, pembicara mengakui kesulitan teknis yang sering dihadapi pemerintah dalam melaksanakan GRB, tetapi menekankan pentingnya menggunakan lensa gender untuk mengidentifikasi masalah, mengintervensi, dan memantau, karena pendekatan ini memungkinkan pemahaman tentang realitas di lapangan dan terciptanya kebijakan berbasis bukti. Secara keseluruhan, pidato tersebut menyoroti pentingnya Penganggaran yang Responsif Gender dalam memastikan fokus dan dampak yang adil bagi semua orang dan perlunya strategi yang terdokumentasi dengan baik untuk menciptakan ketahanan.

c. Fauziah Salleh: former Malaysian MP & currently defending her seat

Dalam pidatonya, seorang anggota Parlemen berbagi pengalaman mereka dalam menerapkan Jarbide Malaysia, yang juga dikenal sebagai Penganggaran Responsif Gender. Pembicara menekankan pentingnya memahami posisi masing-masing negara dan merancang tata letak jalan untuk masing-masing masalah, karena tidak ada aturan universal yang dapat diterapkan secara setara untuk semua.

Namun, pembicara juga mengakui bahwa penerapan undang-undang di berbagai belahan dunia membutuhkan keberanian, karena setiap negara memiliki hambatan dan tantangan tersendiri. Di Malaysia, pembicara mencatat bahwa parlemen Malaysia tidak seaman anggota parlemen di Filipina, karena yang terakhir dapat menyusun undang-undang sedangkan yang pertama hanya dapat mengesahkannya.

Pembicara menceritakan perjuangan mereka dalam mencoba mendorong agenda anggaran yang tanggap gender, meskipun pemerintah telah mengumumkan inisiatif tersebut. Poin-poin yang dipilih oleh berbagai kementerian tidak dilaksanakan, dan tidak ada hasil yang terlihat. Minimnya data dan pengetahuan tentang berapa besar anggaran

yang harus dialokasikan untuk kelompok mana menjadi kendala yang dihadapi tidak hanya oleh Malaysia tetapi juga oleh negara lain.

Pembicara mengungkapkan kekesalannya dengan resistensi dan penyangkalan yang dihadapi dalam mengimplementasikan agenda anggaran responsif gender. Sebagian laki-laki menganggap kata “gender” terlalu kuat, sementara sebagian perempuan tidak memahami maknanya dan beranggapan bahwa pembahasannya adalah tentang gender ketiga. Pembicara mengklarifikasi bahwa anggaran dirancang untuk setara untuk anak laki-laki, perempuan, laki-laki, dan perempuan.



d. Puteri Komarudin: BKSAP DPR RI

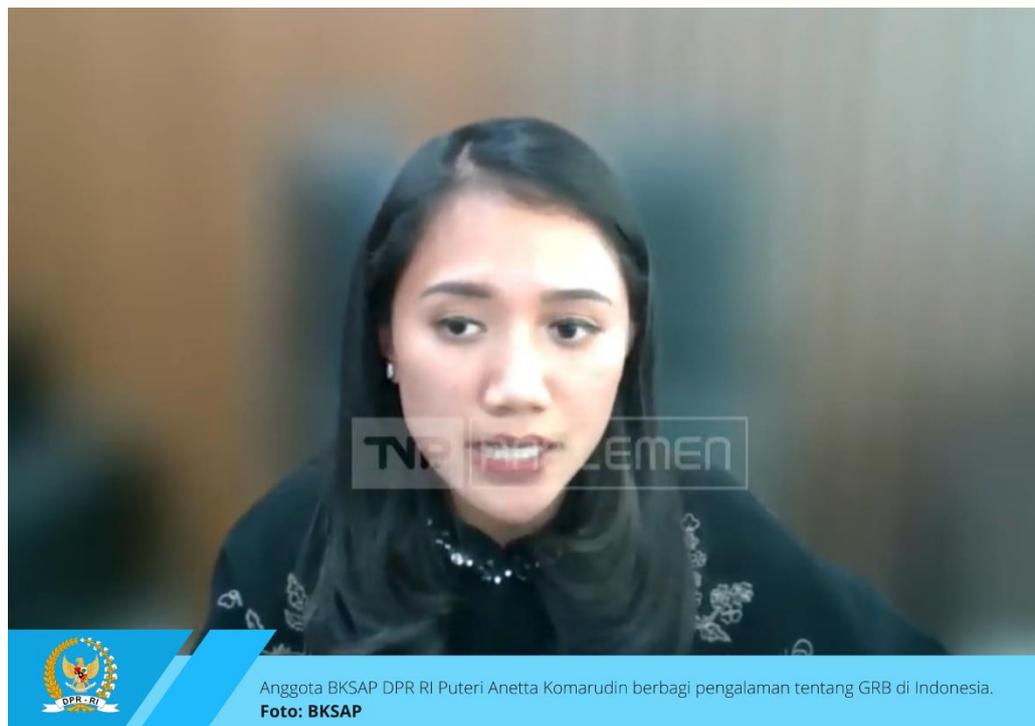
Anggota BKSAP DPR RI Puteri Anetta Komarudin yang hadir secara virtual menekankan pentingnya *Gender Responsive Budgeting* (GRB) atau Penyusunan Anggaran Berbasis Gender dalam konteks demokrasi. Oleh karena, GRB menghubungkan kebijakan fiskal pemerintah dengan agenda kesetaraan gender dalam pembangunan.

Hadir secara virtual, puteri mengatakan bahwa GRB dapat memastikan distribusi sumber daya yang adil bagi semua orang. Pemenuhan hak dan manfaat pembangunan bagi seluruh kelompok masyarakat baik laki-laki maupun perempuan.

Praktik GRB dilakukan di Indonesia sejak tahun 2009 melalui pendekatan sistem perencanaan dan penganggaran yang berperan sebagai alat

untuk mengintegrasikan gender dalam pembangunan. Indonesia juga telah melembagakan GRB di tingkat nasional dan daerah, yang dikenal sebagai Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (GRPB).

Dengan pendekatan ini diharapkan akan memberikan dampak penting pada peningkatan *Gender Empowerment Index* (IDG) dan *Gender Development Index* (GMI) di tingkat nasional dan daerah.



Dalam implementasinya, GRB terus disempurnakan secara bertahap. Misalnya, pemerintah juga merilis Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender, melalui *Gender Responsive Planning and Budgeting* (GRPB) untuk mempercepat implementasi pengarusutamaan gender yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dengan demikian, Parlemen Indonesia memainkan peran penting dalam proses pembangunan GRB di Indonesia melalui fungsi legislasi, pengawasan juga anggaran. Ini adalah tanggung jawab parlemen untuk meningkatkan komitmen di semua tingkat pengambilan kebijakan.

e. Atty. Sha Elijah Dumama-Alba: WFD Bangsamoro

Dalam pidatonya baru-baru ini, perwakilan dari daerah otonom menggarisbawahi pentingnya penganggaran berbasis gender dan penerapannya di komunitas mereka. Komunitas tersebut muncul setelah perselisihan yang berkepanjangan dan telah menandatangani perjanjian

damai dengan pemerintah Filipina, yang mencakup ketentuan tentang penggunaan dana bantuan pemerintah dan internasional untuk upaya terkait gender.

Perjanjian tersebut telah memberikan rakyat Moro penentuan nasib sendiri politik dan fiskal yang lebih besar, dengan sebagian kecil dari total pendapatan pemerintah dialokasikan ke wilayah tersebut. Anggaran untuk daerah harus menjalani proses yang cermat di tingkat nasional untuk menentukan sumber daya yang dapat digunakan, sehingga membuka peluang bagi Bangsa Moro untuk menerapkan penganggaran berbasis gender.

Pembicara menekankan bahwa penganggaran berbasis gender tidak hanya tentang membagi persentase dari anggaran, tetapi juga penting untuk mengembangkan usaha yang akan mendorong kesetaraan gender. Ada protokol untuk menyiapkan anggaran, yang mengharuskan identifikasi masalah menggunakan data terakreditasi gender dan analisis gender, dan memasukkan perempuan ke dalam intervensi keamanan dan Covid.



Daerah memiliki komisi untuk perempuan yang meneliti anggaran semua kementerian dan lembaga, dan jika dianggap perlu, menyerahkannya ke pemerintah pusat. Namun demikian, pembicara juga mengakui adanya kendala dalam penerapan penganggaran berbasis gender, seperti kurangnya data agregat gender dan persyaratan untuk memperkuat sistem gender focal point.

Secara keseluruhan, pembicara menekankan perlunya penganggaran berbasis gender dilaksanakan di negara Moro dan menyerukan undang-undang untuk memperkuat kebijakan dan memastikan tolok ukur ditetapkan dan dicapai setiap tahun.

Discussant / Intervensi

a. Penanggap pertama di sesi III

Laki-laki dan perempuan sebenarnya mempunyai peran dan fungsi yang saling melengkapi di masyarakat, khususnya dalam ruang lingkup politik dan pemerintahan. Oleh karena itu, tidak dibutuhkan adanya rasa kompetisi (kontes) antara perempuan dan laki-laki ketika ingin menduduki jabatan di parlemen. Hal yang dibutuhkan hanyalah bagaimana kepekaan untuk dapat membangun masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu pemahaman antara laki-laki dan perempuan yang harus saling bekerja sama di dalam satu unit dan tim harus ditingkatkan.

Meskipun begitu, tak bisa dipungkiri jikalau berada di bawah tim yang sama tetap berada satu tujuan dan pemikiran. Oleh karena itulah pertanyaan dengan berdasarkan pengalaman politisi yang ada terkait bagaimanakah anggota-anggota muda di parlemen membuat kebijakan-kebijakan responsif gender beserta apa saja yang harus disampaikan agar bisa dicapai.



b. Penanggung Kedua di sesi III

Pertanyaan terkait bagaimanakah sistem penganggaran mengenai perempuan di lingkup politik. serta bagaimanakah untuk meningkatkan kesadaran dalam budaya mengenai hal-hal perempuan dalam politik pemerintahan. Terlebih lagi di negara tersebut tidak memiliki parlemen DPR seperti di Indonesia. Ketentuan dan kebijakan seperti apa yang terjadi Indonesia terkait perempuan, agar bisa dibagikan kepada negara yang dasarnya adalah *single party*.

Negaranya sendiri jika ingin membuat suatu penganggaran maka akan melibatkan banyak sekali pertimbangan karena di negara mereka terbilang cukup mudah atau bahkan cenderung sangat mudah. Oleh karena itulah para mpd negara mereka membantu dalam hal pendidikan dan juga wfd yang membantu dalam menyusun kerangka manualnya. Oleh karena itulah, karena mereka tidak memiliki anggota parlemen seperti DPR, maka mereka ingin mengetahui bagaimanakah caranya untuk meningkatkan kesadaran terkait perempuan dalam bidang politik.



Ditemui secara terpisah, Anggota BKSAP DPR RI Adde Rossi Khoerunnisa, mengatakan belum maksimalnya partisipasi politik perempuan diakibatkan karena belum terbukanya akses perempuan untuk masuk dalam partai politik membuat mereka tidak percaya diri untuk masuk ke dalam dunia politik.

Pendidikan politik itu adalah hal yang sangat penting, hal yang amat sangat dibutuhkan, karena perempuan itu kalau sudah memasuki dunia politik bukan hanya

gayanya bicara saja diperlihatkan tetapi bagaimana isi, kapabilitas dan juga kompetensi si perempuan tersebut. Indonesia ini sudah memiliki kebijakan yang sangat mumpuni dan sangat mendukung sekali bagaimana keberadaan perempuan di dunia politik di Indonesia ini.

Guna mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia politik, baik di sektor eksekutif maupun legislatif badan kerjasama antara parlemen DPR RI mendukung program pendidikan politik bagi kaum perempuan. Dalam forum *Women Politic Leaders*, Adde Rossi mengatakan dibutuhkan program peningkatan kapasitas dan kapabilitas kaum perempuan karena belum maksimalnya partisipasi politik perempuan yang diakibatkan belum terbukanya akses perempuan untuk masuk dalam partai politik.





III. PENUTUP

A. Anggaran

Kegiatan Delegasi BKSAP DPR RI menghadiri Women's Political Leadership di Bali pada tanggal 6-9 Desember 2022 dilaksanakan dengan mata anggaran 001030.CF.5805.AEC.001.051.E.524111 sebesar Rp439.592.200 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah)

B. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

- a. ASEAN Women's Political Leadership yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada tanggal 6-9 Desember 2022 berjalan lancar.
- b. ASEAN Women's Political Leadership ini dihadiri anggota parlemen perempuan, aktivis perempuan, peneliti serta masyarakat sipil. Delegasi DPR RI aktif menyimak dan memberi tanggapan terkait upaya peningkatan peran perempuan di dunia politik.
- c. Kehadiran delegasi BKSAP DPR RI para ASEAN Women's Political Leadership sangat penting sebagai bentuk diplomasi dan bertukar pengalaman untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan.
- d. Diskusi pada tiap sesinya berlangsung dinamis, karena masing-masing narasumber berbagi pengetahuan dan pengalaman yang telah lakukan dalam upaya meningkatkan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan termasuk di bidang politik.

2. Rekomendasi

- a. Masukan dari kegiatan ASEAN Women's Political Leadership ini akan dijadikan bahan diskusi dengan berbagai stakeholder dan pemangku kebijakan lainnya sebagai upaya meningkatkan partisipasi perempuan.

C. Publikasi media elektronik

Publikasi kegiatan ASEAN Women's Political Leadership dapat diakses di:

1. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42302/t/Demokrasi%20Ber%20Ruang%20yang%20Kondusif%20bagi%20Partisipasi%20Perempuan%20di%20Dunia%20Politik>
2. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42303/t/%E2%80%9CGreen%20Responsive%20Budgeting%E2%80%9D%20Berperan%20Penting%20dalam%20Mewujudkan%20Demokrasi>
3. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42299/t/Legislator%20Tegaskan%20Pentingnya%20Kesadaran%20tentang%20Kepemimpinan%20Perempuan>



4. <https://www.youtube.com/watch?v=UUEd9DrZeew>
5. <https://www.youtube.com/watch?v=ieNIM1SHeBM>
6. <https://www.youtube.com/watch?v=AcDgdqWyGaM>

D. Kata Penutup

Demikianlah laporan keikutsertaan Delegasi BKSAP DPR RI dalam ASEAN Women's Political Leadership yang dilaksanakan tanggal 6-9 November 2022 di Nusa Dua, Bali. Atas nama Delegasi BKSAP DPR RI, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan semoga dokumen laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 29 Desember 2022
Ketua BKSAP DPR RI



Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc.
A-86





Produced by:

COMMITTEE FOR INTER-PARLIAMENTARY COOPERATION
INDONESIAN HOUSE OF REPRESENTATIVES
(BKSAP DPR RI)

Email: biro_ksap@dpr.go.id

Phone: (62-21) 5715813

ksap.dpr.go.id



@bksapdpr



@bksapdpr



bksapdpr



bksapdpr